

Kesiapan Warga Kota Depok Dalam Menghadapi Pilkada Serentak 2020 di Era Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB)

Sugeng Astanto¹⁾, Irwan Siregar²⁾

Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta
Jalan Lenteng Agung Raya No. 32 Jakarta Selatan

¹⁾Email: astantoadil@gmail.com

²⁾Email: irwansir@gmail.com

Abstract: The process of the 2020 simultaneous Pilkada series was carried out with the adaptation of Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) adjusted to health protocols and COVID-19 alert levels in their respective regions. Because it had raised concerns, it is necessary to socialize the implementation procedures according to the guidelines of the AKB and health protocols for Depok city residents, especially residents of Mandala cottage housing, Tugu, Cimanggis, Depok City. The aim is to provide knowledge to prospective voters about AKB in the 2020 simultaneous regional election process, build a positive attitude of prospective voters in implementing health protocols, and form a perception to participate in voting for candidates. The implementation method takes place in the third week of July to the first week of August 2020, through the WA group in two days with a discussion time between 10.00-15.30 WIB. The results can provide benefits to the people of Depok about AKB and health protocols in facing the 2020 simultaneous elections.

Keywords: adaptation of new habits, health protocols, simultaneous elections, socialization

Abstrak: Proses rangkaian Pilkada Serentak 2020 dilaksanakan dengan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) disesuaikan dengan protokol kesehatan dan level kewaspadaan COVID-19 di wilayah masing-masing. Karena sempat menimbulkan kekhawatiran, maka perlu dilakukan sosialisasi mengenai tata cara pelaksanaan sesuai pedoman AKB dan protokol kesehatan bagi warga Kota Depok, khususnya warga RT 01, RW 17, Perumahan Pondok Mandala, Tugu, Cimanggis, Kota Depok. Tujuannya adalah untuk memberi pengetahuan kepada calon pemilih tentang AKB dalam proses Pilkada Serentak 2020, membangun sikap positif calon pemilih dalam melaksanakan protokol kesehatan, dan membentuk persepsi untuk ikut serta mencoblos kandidat. Metode pelaksanaannya berlangsung dalam minggu ketiga Juli sampai minggu pertama Agustus 2020. Proses kegiatannya melalui Grup WA (GWA) dalam dua hari dengan waktu diskusi antara pukul 10.00 – 12.00 dan berlanjut pukul 14.00 – 15.30 WIB. Hasilnya dapat memberi manfaat bagi masyarakat Kota Depok tentang AKB dan protokol kesehatan dalam menghadapi Pilkada Serentak 2020, yaitu masyarakat menjadi siap menghadapi Pilkada serentak 2020.

Kata kunci: adaptasi kebiasaan baru, pilkada serentak, protokol kesehatan, sosialisasi

I. PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung dirumuskan dalam Undang-Undang (UU) No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) No.6/2005 tentang tata cara pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. UU No.32/2004 merupakan

revisi UU No.22/1999. Perubahan oleh sistem pilkada sangat besar dan selama ini pilkada langsung menjadi wilayah eksklusif elite politik, pada masa UU No. 5/1974 peranan Presiden dan Mendagri sangat besar dan menentukan.

Berdasarkan UU No.16/2015 tentang Penyelenggara Pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam Pasal 17 UU ini dinyatakan bahwa KPU wajib melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan

pemilihan umum (pemilu) atau yang berkaitan dengan tugas KPU kepada masyarakat. Hal ini menjadi sasaran utama sosialisasi politik bagi semua lapisan masyarakat. Tujuan dari kegiatan sosialisasi politik adalah untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat agar mereka ikut serta memilih pemimpinnya secara langsung, baik presiden dan wakil presiden, gubernur, bupati, walikota serta anggota DPR RI, DPRD I, DPRD II, dan DPD.

Gambaran pelaksanaan pilkada langsung terlihat dari hasil penelitian, Indiana Ngenget (Ngenget, 2020). Secara umum kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, kaitannya sebagai salah satu pengembangan demokrasi di tingkat lokal sudah lebih maju dengan model pemilihan secara langsung, dimana rakyat terlibat dalam memilih pemimpinnya. Pemilihan kepala daerah secara langsung yang digelar secara demokratis adalah salah satu bentuk keberhasilan pendidikan politik. Hal ini mampu mendorong partisipasi masyarakat di tingkat lokal yang diharapkan akan menyumbang terhadap percepatan pembentukan masyarakat madani atau *civil society*. Melalui otonomi daerah, masyarakat daerah dapat berperan lebih aktif dalam melakukan kontrol sosial, sehingga terbentuk pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Hal ini akan mempercepat terbentuknya pemerintahan daerah yang lebih baik dan kuat.

Pada saat ini Indonesia mempunyai 34 provinsi dan 500 kabupaten/kota, yang proses pemilihan kepala daerahnya (gubernur/bupati/walikota) dilakukan secara langsung. Ketika adanya kebijakan Pilkada secara serentak, 264 daerah telah menyelenggarakan Pilkada serentak pada 9 Desember 2015. Pemilihan kepala daerah secara langsung pada masa otonomi daerah pertama kali diadakan pada tanggal 1 April

2005 di kota Jayapura, Papua dan 27 April 2005 di Kabupaten Tuban, Jawa Timur.

Pelaksanaan pilkada yang telah berlangsung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2015, ditemukan permasalahan-permasalahan yang cukup mengkhawatirkan. Pada beberapa daerah erat kaitannya dengan adanya kericuhan, kerusuhan dan sengketa bahkan korupsi yang menjadi gejala umum. Pada sisi lain, pilkada langsung juga memerlukan anggaran dalam jumlah yang besar, yang membebani keuangan daerah dan negara serta calon peserta pilkada.

Analisis mengenai pelaksanaan dan hasil dari sebuah pemilihan kepala daerah secara langsung (pilkada) yang telah dilakukan di berbagai wilayah Indonesia, baik di provinsi, kabupaten dan kota dapat menggambarkan potret mikro politik di Indonesia. Gambaran dinamika politik Indonesia, sesungguhnya mempunyai korelasi yang erat dengan dinamika budaya dan politik lokal yang sangat kaya dan beragam. Hal ini menyiratkan bahwa dinamika politik nasional dapat dirunut awalnya dari politik lokal atau sebaliknya.

Pilkada Serentak yang telah terlaksana 2 kali, 2015 dan 2018, tentu sangat berbeda dengan pilkada serentak 2020 kali ini, karena pandemi COVID-19. Maka proses rangkaian Pilkada Serentak 2020, disesuaikan dengan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Bahkan pelaksanaan pemungutan suara secara langsung digelar secara serentak, 9 September 2020, namun diundur menjadi 9 Desember 2020, karena imbas dari pandemi COVID-19.

Daerah yang mengikuti Pilkada Serentak di Indonesia sebanyak 270 daerah, dengan rincian, 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota. Khusus Jawa Barat, Pilkada Serentak 2020, akan digelar di 8 daerah, yaitu: 1. Kabupaten Bandung; 2. Kabupaten Cianjur; 3. Kabupaten Sukabumi; 4. Kabupaten Karawang; 5. Kabupaten

Indramayu; 6. Kabupaten Tasikmalaya; 7. Kabupaten Pangandaran, dan 8. Kota Depok.

Proses rangkaian Pilkada Serentak akan dilaksanakan dengan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) disesuaikan dengan protokol kesehatan dan level kewaspadaan covid di wilayah masing-masing. Pelaksanaan kampanye berbeda di setiap zona, baik kampanye rapat umum, kampanye tatap muka terbatas, kampanye tertutup, dan sebagainya dengan protokol kesehatan.

Dalam melaksanakan proses Pilkada Serentak 2020 di Kota Depok, KPUD bekerja sama dengan Gugus Tugas Jawa Barat. Menurut KPUD Jawa Barat, dalam AKB langkah-langkah yang akan diambil secara umum adalah sebagai berikut: Menambah jumlah alat coblos, penggunaan sarung tangan sekali pakai bagi pemilih, mengurangi kuota per TPS, mengatur durasi dan jarak pemungutan suara, dari 800 orang per TPS menjadi 500 orang per TPS, penyediaan *hand sanitizer*, masker, dan sebagainya.

Proses pilkada di masa pandemi sangat berbeda dengan proses pilkada sebelumnya, maka sangat penting untuk dilakukan sosialisasi berkaitan dengan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) khususnya bagi masyarakat calon pemilih pada Pilkada Serentak 2020 di Kota Depok.

Dalam perspektif komunikasi politik, sosialisasi politik merupakan proses pembelajaran sebagai proses komunikasi. Komunikasi menurut Shannon dan Weaver adalah bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lainnya, sengaja atau tidak sengaja. Tidak terbatas pada bentuk komunikasi menggunakan bahasa verbal, tetapi juga dalam hal ekspresi muka, lukisan, seni bahkan teknologi (Corytawaty, Nova; Lobodally, 2017). Komunikasi politik (political communication) adalah metode analisa politik yang baru berkembang sejak dasawarsa 1990an dalam ilmu politik di Indonesia, namun ia mulai diserap dan

diterapkan secara signifikan di dunia akademik sejak awal abad ke- 21, ketika perkembangan demokrasi dan teknologi informasi melanda secara global (Suryani, 2019).

Belajar langsung, orang memperoleh orientasi yang merupakan orientasi politik dengan (1) meniru pikiran, perasaan, dan tindakan orang yang mengadakan hubungan dengan dirinya, (2) mengantisipasi apa yang diharapkan orang lain dalam situasi tertentu, (3) pendidikan langsung, dan (4) pengalaman langsung. Sementara belajar tak langsung, berlawanan dengan belajar langsung, cara tak langsung dihasilkan dari pengalaman personal dengan pengganti orang, objek, atau peristiwa (Nimmo, 2010).

Dalam konteks ini, maka perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat calon pemilih baik secara langsung misalnya dengan memberikan pendidikan politik, dan secara tidak langsung menggunakan alat peraga atau media komunikasi, terutama berkaitan dengan AKB dan protokol kesehatan khususnya bagi masyarakat calon pemilih pada Pilkada Serentak 2020 di Kota Depok.

Terkait dengan kegiatan sosialisasi tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini adalah, Bagaimana kesiapan warga Depok dalam melaksanakan kegiatan Pilkada Serentak 2020 di Era Adaptasi Kebiasaan baru?

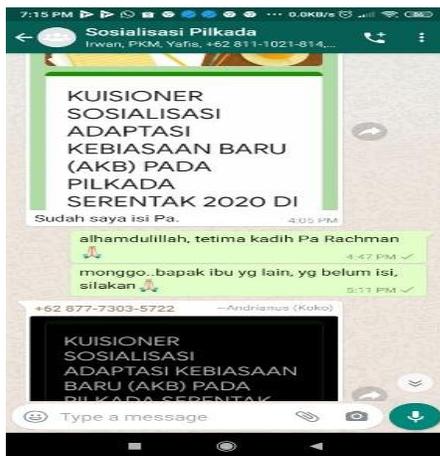
II. METODE PELAKSANAAN

Peserta kegiatan Sosialisasi Adaptasi Kebiasaan Baru pada Pilkada Serentak 2020 adalah warga anggota *Group WA* (GWA) RT 01, RW 17, Perumahan Pondok Mandala, Tugu, Cimanggis, Kota Depok, diikuti 30 orang. Warga dipilih mengingat keterlibatan mereka memiliki kontribusi positif dalam menghasilkan demokrasi yang berkualitas. Selain itu tim PKM dari IISIP

Jakarta ingin mengetahui seberapa besar warga Perumahan Pondok Mandala sebagai agen perubahan memiliki minat untuk menyampaikan informasi tentang protokol kesehatan dalam pelaksanaan pilkada bagi waganya. Diharapkan peserta aktif ini dapat menularkannya kepada anggota keluarga, tetangga, saudara, teman, dan sebagainya.

Pelaksanaan berlangsung dalam rentang minggu ketiga Juli sampai minggu pertama Agustus 2020. Kegiatan dilakukan melalui *online* GWA selama dua hari dengan rentang waktu diskusi antara pukul 10.00 – 12.00 dan berlanjut pukul 14.00 – 15.30 WIB.

Kegiatan PKM melalui Grup WA warga RT. 01, RW 17, Perumahan Pondok Mandala, Tugu, Kota Depok, diikuti 30 orang dilaksanakan pada 12 Agustus 2020, dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB. Sebelum memulai sosialisasi, tim PKM memberikan waktu kepada peserta mengisi kuesioner dalam bentuk *Google Form (pretest)* untuk mendapatkan informasi tentang pengetahuan awal mereka terhadap protokol kesehatan dan minat mereka untuk berpartisipasi dalam pilkada Depok. Hal ini seperti yang ditunjukkan dalam gambar 2.

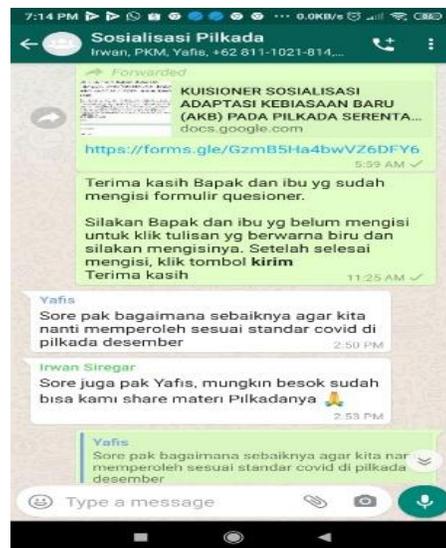


Gambar 1 Proses Sosialisasi melalui GWA

Selanjutnya, tim PKM memberi materi sosialisasi dalam bentuk PDF dan *powerpoint*. Setelah memberikan *file* materi secara utuh, tim PKM menjelaskan materi satu per satu dengan cara memasukkan *capture matter* ke GWA.

Tujuannya adalah setiap materi yang ingin disampaikan kepada peserta dapat tersampaikan dan diterima dengan baik. Setelah selesai menjelaskan materi, tim PKM membuka ruang diskusi dengan anggota GWA, walaupun di tengah pemberian materi, peserta sudah aktif dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Setelah selesai tanya jawab, tim PKM memberikan kuesioner dalam bentuk *Google Form (post test)* sebagai bahan evaluasi kegiatan sosialisasi.

Peserta GWA warga Perumahan Pondok Mandala RT. 01, RW 17 cukup aktif selama kegiatan PKM berlangsung. Pertanyaan dan tanggapan dari peserta yaitu: bagaimana teknik pengaturan calon pemilih ketika berada di TPS dan pembatasan jumlahnya? Bagaimana tahapan dari protokol kesehatan? Bagaimana jika ada pemilih datang ke TPS lalu memiliki suhu tinggi? Apa langkah yang harus dilakukan? Apakah petugas TPS akan di test covid terlebih dahulu? Apa saja peralatan kesehatan yang disiapkan oleh pemerintah untuk petugas TPS? Hal ini seperti yang ditunjukkan dalam gambar di bawah ini:



Gambar 2 Kegiatan Sosialisasi di WAG

Pelaksanaan PKM sosialisasi mengenai Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) kepada warga Perumahan Pondok Mandala RT.01 RW.17, Kelurahan Tugu, Cimanggis, Kota Depok berjalan dengan baik. Tujuan dari sosialisasi ini adalah

membantu meningkatkan pengetahuan warga dalam memahami tentang Pilkada serentak di era adaptasi kebiasaan baru di Kota Depok pada tanggal 9 Desember 2020. Pada akhirnya materi sosialisasi dapat disampaikan kepada warga Pondok Mandala. Sosialisasi mengenai AKB yang berpedoman protokol kesehatan memang sangat diperlukan oleh warga yang berdomisili di Kota Depok, karena jika melihat pertanyaan-pertanyaan dalam diskusi dengan warga, mereka memiliki kekhawatiran yang cukup tinggi mengenai adanya pelaksanaan Pilkada di masa pandemi COVID-19.

Kekhawatiran warga dapat dikurangi dengan upaya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya KPU Kota Depok, yang seharusnya melaksanakan sosialisasi AKB ini secara lebih intensif ke masyarakat, terutama bagi masyarakat yang memiliki hak pilih (DPT). Upaya sosialisasi yang dilakukan kepada warga Pondok Mandala oleh tim PKM IISIP Jakarta, secara khusus dapat membantu kekurangan dari upaya-upaya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya KPU Kota Depok. Kesimpulannya pelaksanaan PKM oleh tim dosen IISIP Jakarta dalam sosialisasi mengenai AKB dengan Protokol Kesehatan dalam pilkada serentak 2020 kepada masyarakat di Kota Depok sangat diperlukan.

Kemudian, pelaksanaan AKB kepada warga RT. 01, RW. 17, Pondok Mandala, Tugu, Depok, berjalan cukup baik. Pertanyaan warga hanya seputar, jaminan kesehatan selama diadakannya Pilkada. Warga tidak ingin ambil resiko tertular. Pada awalnya ada yang merasa khawatir untuk tidak mau mencoblos, karena seringkali aturan tidak diterapkan dalam kenyataannya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil kegiatan Sosialisasi AKB dalam Pilkada Serentak 2020 bagi warga Perumahan Pondok Mandala, berikut kami

sampaikan data peserta yang ikut dalam sosialisasi tersebut. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi sebanyak 30 peserta, dengan komposisi Laki-laki 16 orang dan Perempuan 14 orang. Sedangkan tingkat pendidikan peserta sosialisasi terdiri dari Lulusan SMA (43%) dan Lulusan Perguruan Tinggi (57%). Untuk lulusan SD dan SMP tidak ada. Selanjutnya, penulis ingin menyampaikan hasil kegiatan sosialisasi AKB melalui Group WA warga. Penyampaian hasil ini penulis bagi 2 tahap, yaitu hasil kegiatan sebelum sosialisasi dan setelah dilakukan sosialisasi.

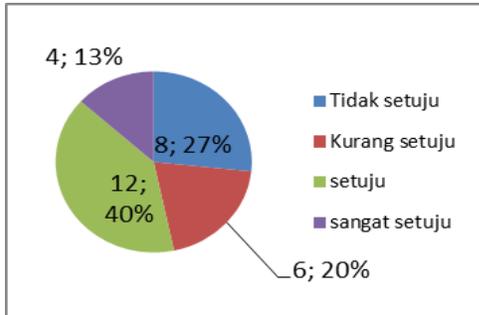
1. Keadaan Warga sebelum dilaksanakan Sosialisasi

Sebelum diberikan materi tentang AKB dalam pilkada serentak, sebagian besar warga memahami mengenai tata cara pilkada dengan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, mencuci tangan, diberikan sarung tangan dan dicek suhu tubuhnya. Meskipun demikian masih ada warga yang belum mengetahui hal tersebut, namun hanya sebagian kecil, seperti yang tidak mengetahui pilkada hanya 10%, tidak mengetahui dalam menggunakan sarung tangan 10 %. Sedangkan yang tidak mengetahui harus dicek suhu tubuhnya sebanyak 47 %.

Terkait kegiatan Pilkada dengan akan terpilihnya pemimpin yang berkualitas di Kota Depok, sebagian besar masyarakat (93,7%) meyakini akan terpilih walikota Depok yang berkualitas. Sementara 7 % warga tidak meyakini akan hal tersebut. Bahkan ketika warga ditanya mengenai, apakah setiap suara yang dicoblos juga akan menentukan pemimpin Depok yang berkualitas, sebagian besar warga menjawab sangat setuju (30%), yang menjawab setuju (63%). Sementara warga yang menjawab tidak setuju (7%). Keadaan ini artinya masih ada kepercayaan warga mengenai suaranya akan berakibat pada kepemimpinan yang akan membawa kota Depok lebih maju.

Sementara itu kekhawatiran warga untuk ikut mencoblos dalam pilkada serentak 2020 sebelum diberikan sosialisasi, menunjukkan data terdapat 53% (setuju dan sangat setuju) warga

yang masih khawatir datang ke TPS, sedangkan 7% warga tidak khawatir. Hal ini menunjukkan masih sangat tinggi warga khawatir untuk datang ke TPS. Berikut grafik kekhawatiran warga untuk datang ke TPS:



Grafik 1 Grafik Kekhawatiran Warga datang Ke TPS (n = 30)

Kesediaan warga untuk hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS) juga menjadi perhatian penulis terkait dengan kegiatan Pilkada serentak 2020. Sebelum diberikan sosialisasi, warga Pondok Mandala Depok sudah ada yang menyatakan bersedia (setuju) untuk hadir di TPS yaitu sebanyak 67 %, sementara sisanya 23 % belum bersedia hadir di TPS.

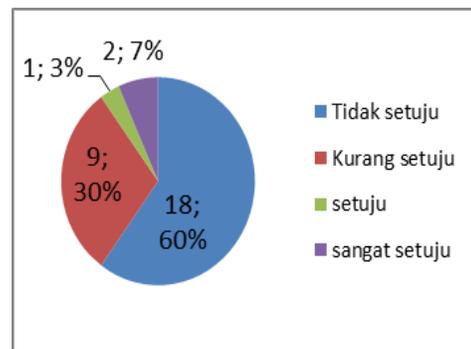
Sementara warga Pondok Mandala, bersedia mengajak teman-temannya untuk hadir di TPS, yaitu sebanyak 87%, sedangkan warga yang tidak ingin mengajak temannya ada sebanyak 13%.

2. Keadaan Warga setelah dilaksanakan Sosialisasi

Setelah TIM dari IISIP Jakarta melaksanakan sosialisasi AKB dalam Pilkada Serentak 2020, maka terdapat peningkatan pengetahuannya. Sebelum diberikan sosialisasi, separuh (50%) dari warga tidak mengetahui mengenai akan adanya Pilkada Serentak untuk memilih wali kota Depok pada tanggal 9 Desember 2020. Setelah diberikan sosialisasi, maka warga yang tahu bertambah menjadi 97 %, sementara sisanya 3% belum tahu.

Untuk pengetahuan dalam penggunaan protokol kesehatan, juga mengalami peningkatan pengetahuan yang sempurna, dari 90% menjadi 100% mengetahui mengenai protokol kesehatan

(menggunakan masker, cek suhu tubuh dan menggunakan sarung tangan). Terkait dengan Pendapat warga bahwa suara yang diberikan pada saat pilkada akan menentukan munculnya pemimpin yang berkualitas, maka warga yang awalnya meyakini 97 % bertambah keyakinannya menjadi 100 % suara warga yang diberikan akan menentukan pemimpin yang berkualitas. Terkait dengan kekhawatiran warga untuk datang ke TPS yang awalnya sebanyak 53% warga masih khawatir berkurang menjadi 10% warga khawatir untuk mendatangi TPS. Dengan demikian sebanyak 90 % warga Perumahan Pondok Mandala tidak khawatir untuk datang ke TPS. Berikut grafiknya:



Grafik 2 Grafik Kekhawatiran Warga Datang Ke TPS (n = 30)

Ketidakkhawatiran warga tersebut juga menimbulkan niat untuk mengajak warga yang lain datang ke TPS. Pada awalnya niat mengajak warga lain untuk datang ke TPS sebanyak 87% dan setelah mendapatkan sosialisasi meningkat menjadi 97%.

Sementara warga juga akan tetap memilih calon pilihannya, yang semula hanya 94% menjadi bertambah 100% untuk memilih calonnya setelah mendapatkan sosialisasi tentang Pilkada Serentak.

Data lain juga menunjukkan, bahwa warga Pondok Mandala menyatakan mempunyai keinginan kuat untuk mencoblos salah satu pasangan calon dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok. Pada awalnya jumlahnya sebanyak 63% warga yang mempunyai keinginan kuat untuk mencoblos,

sedangkan 37% tidak punya keinginan untuk mencoblos. Setelah dilakukan sosialisasi mengenai Pilkada Serentak 2020, jumlah warga yang mempunyai keinginan kuat untuk mencoblos mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu sebesar 100% (yang setuju 33% dan sangat setuju 67%).

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka sebagian besar warga Pondok Mandala Depok sangat memahami benar dalam menerapkan protokol kesehatan selama kegiatan pilkada serentak 2020. Sementara itu kekhawatiran warga untuk datang memilih pasangan calon sebagian besar tidak khawatir. Warga juga siap mengajak warga yang lain untuk hadir di TPS. Disamping itu warga akan tetap hadir memilih dan mencoblos pangan calon yang dikehendaki. Dengan demikian, Warga Pondok Mandala Kelurahan Tugu mempunyai kesiapan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di Wilayah Kota Depok.

Pilkada serentak Kota Depok telah terselenggara pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020. Menurut data dari KPU Kota Depok, secara keseluruhan warga yang berpartisipasi untuk memilih sebanyak 62 %. Sementara itu, warga yang berada di TPS 173, dimana warga Rt 01/17 perumahan pondok Mandala melaksanakan hak pilihnya, diperoleh data sebanyak 68,4 % warga telah berpartisipasi (Kpud, 2020) . Hal ini berarti Sosialisasi mengenai Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pilkada Serentak 2020 yang dilaksanakan oleh TIM Pengabdian Kepada Masyarakat dari IISIP Jakarta menunjukkan hasil yang signifikan.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil kegiatan yang telah dipaparkan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Warga Mengetahui adanya kegiatan Pilkada Serentak 2020 pada tanggal 9 Desember 2020
2. Warga memahami bahwa dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 harus menerapkan protokol kesehatan
3. Warga tidak khawatir untuk hadir di Tempat Pemungutan Suara dalam kegiatan Pilkada Depok
4. Warga mempunyai keinginan untuk mengajak warga yang lain datang ke Tempat Pemungutan Suara
5. Warga akan hadir di Tempat Pemungutan Suara dan akan memilih Pasangan calon yang dikehendaki.
6. Warga mempunyai kesiapan dalam melaksanakan Pilkada Serentak 2020.

V. DAFTAR RUJUKAN

- Corytawaty, Nova; Lobodally, A. (2017). KOMUNIKASI VERBAL DAN NONVERBAL DI ANTARA KAUM HOMOSEKSUAL (Studi Deskriptif Pada Pasangan Kaum Homoseksual di Jakarta). *Cakrawala*, 6(2), 277–296.
- Kpud. (2020). *Data Pilkada*. <https://kota-depok.kpu.go.id/>
- Ngenget, I. (2020). Strategi Hashtag ”2019 Ganti Presiden” Sudrajat-Ahmad Saikhu dalam Pilkada Jawa Barat 2018. *ISIP Institut Ilmu Sosial Dan Politik*, 17, 82–94. https://www.researchgate.net/publication/347505304_Strategi_Hashtag_2019_Ganti_Presiden_Sudrajat-Ahmad_Saikhu_dalam_Pilkada_Jawa_Barat_2018
- Nimmo, D. (2010). *Komunikasi Politik* (6th ed.). Rosda.
- Suryani, E. (2019). KOMUNIKASI POLITIK: ASAL USUL DAN KONSEPSI. *Analisis Sosial Politik*, 5(1), 34.